

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

	ASPEK	FOKUS	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH</b>						
		Peraturan ttg Kependudukan	Kab/Kota memiliki Perda tentang Kependudukan	Jumlah Kab/Kota memiliki Perda Kependudukan dibagi jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %  22 ----- x 100% = 100 % 22	Kab/Kota yang memiliki Perda Kependudukan , sebanyak 22 Daerah (Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab.TTU, Kab. Nagekeo, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Tengah, Kab. TTS, Kab. Belu, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Alor, Kab.Rote Ndao, Kab. Ende, Kab. Sumba Barat Daya, Kab, Manggarai Barat, Kab. Sikka, Kab. Sabu Rajjua, Kab.Malaka)  Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak : 22 Daerah.	100 %	
2	<b>KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH</b>						
			Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005  1 Perda	Apabila ADA: Dasar hukumnya : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan	Ada	

	ASPEK	FOKUS	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
					Kedua atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PERDA Nomor : 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Pelayanan Publik	Keberadaan Perda tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> <sup>1</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak ada standar pelayanan publik	Perda Prov. NTT No. 4/2008 ttg Pelayanan Publik di Prov. NTT (standar pelayanan publik')	ADA	
3	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	Perda yang ditetapkan	Jumlah perda yang ditetapkan dalam tahun 2017	Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2017, sebanyak 9 Perda	16	
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016	Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi Jumlah Ranperda yang diusulkan tahun 2016 $\frac{15}{9} \times 100\% = 60\%$	- RANPERDA yang diusulkan tahun 2017, sebanyak 15 RANPERDA. - RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017, sebanyak 9 PERDA.	60 %	
4	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut keputusan Gubernur (Kep Gub)	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah KepGub dalam tahun 2017 X 100% $\frac{330}{330} \times 100\% = 100\%$	- Keputusan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak 330 keputusan. - Keputusan yang ditindaklanjuti, sebanyak - 330 keputusan.	100 %	

<sup>1</sup> Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.

	ASPEK	FOKUS	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Tindaklanjut Peraturan Gubernur (Per Gub)	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah PerGub yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah PerGub dalam tahun 2017 X 100%  41 ----- x 100 % = 100 % 41	- Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak 41 Pergub. - Peraturan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak 41 Pergub.	100 %	
5	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	Jumlah perda yang dibatalkan	Jumlah perda yang dibatalkan dibagi Jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%  0 ----- x 100 % = 0 % 9	Perda yang dibatalkan <u>Tidak ada</u>  Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 9 Perda.	0 %	
6	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda atau PerGub tentang konsultasi publik	Keberadaan perda atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada Perda atau PerGub  TIDAK ADA	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya.	TIDAK ADA	

22 Kab/Kota di Provinsi NTT :

1. Kota Kupang,
2. Kab. Kupang,
3. Kab. TTU,
4. Kab. Nagekeo,
5. Kab. Flores Timur,
6. Kab. Lembata,
7. Kab. Manggarai,
8. Kab. Sumba Tengah,

9. Kab. TTS,
- 10 Kab. Belu,
11. Kab. Ngada,
12. Kab. Manggarai Timur,
13. Kab. Sumba Barat,
14. Kab. Sumba Timur,
15. Kab. Alor,
16. Kab.Rote Ndao,
17. Kab. Ende,
18. Kab. Sumba Barat Daya,
19. Kab, Manggarai Barat,
20. Kab. Sikka,
21. Kab. Sabu Raijua,
22. Kab.Malaka)

Kupang, 22 Januari 2018

a.n. KEPALA BIRO HUKUM  
KABAG. BANTUAN HUKUM,

ALEXON LUMBA, SH, M.Hum  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19670828 199510 1 001